

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang dimaksud. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka untuk saat ini pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang besar untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari suatu daerah demi membiayai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Dengan kewenangan penuh terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah ini, diharapkan nantinya daerah dapat membiayai

kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Guna mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan mampu untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009, PAD terdiri dari:

- (1) Hasil Pajak Daerah,
- (2) Hasil Retribusi daerah,
- (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya

PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu juga dengan Kota dan Kabupaten yang ada di Sumatra Selatan, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten PALI yang juga telah memiliki otonomi daerah tersendiri, sebagai Salah satu contoh pajak yang dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah

yang mana didalamnya pajak yang dipungut oleh daerah adalah pajak Sarang Burung Walet (SBW).

Penetapan pajak sarang burung walet diatur dalam Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Peraturan Daerah masing masing Kota/Kabupaten tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, ini merupakan sebagai salah satu objek pajak Daerah yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. anggaran dari Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2013-2017 secara berurutan sangat bervariasi, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

Nama Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Kota Palembang	2013	50.000.000	31.965.000
	2014	30.000.000	26.400.000
	2015	50.301.000	64.109.000
	2016	60.474.342	68.450.001
	2017	75.927.000	77.849.880
Kota Prabumulih	2013	30.000.000	27.100.000
	2014	30.000.000	28.200.000
	2015	30.000.000	27.650.000
	2016	30.000.000	27.750.000
	2017	77.528.000	27.150.000
Kota Lubuklinggau	2013	120.000.000	54.765.280
	2014	60.000.000	62.412.000
	2015	65.000.000	66.376.000
	2016	319.920.000	80.224.000
	2017	300.000.000	75.710.000
Kabupaten OKU Selatan	2013	100.000.000	0
	2014	100.000.000	1.779.000
	2015	50.000.000	712. 350
	2016	50.000.000	399.000
	2017	50.000.000	400.000
Kabupaten OKU Timur	2013	25.000.000	455.850
	2014	25.000.000	1.952.000
	2015	10.000.000	2.150.000
	2016	10.000.000	600.000

Nama Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	2017	10.000.000	8.250.000
Kabupaten Ogan Komerling Ilir	2013	25.000.000	25.030.000
	2014	25.000.000	25.560.000
	2015	15.000.000	23.530.000
	2016	15.000.000	19.920.000
	2017	30.000.000	30.330.000
Kabupaten Ogan Ilir	2013	3.000.000	0
	2014	3.000.000	0
	2015	3.000.000	3.096.000
	2016	3.000.000	0
	2017	3.000.000	1.700.000
Kabupaten Banyuasin	2013	18.145.000	8.037.500
	2014	8.037.500	15.564.250
	2015	12.000.000	12.195.000
	2016	14.000.000	24.910.000
	2017	14.550.000	22.770.000
Kabupaten Musi Banyuasin	2013	52.500.000	38.250.000
	2014	52.500.000	34.300.000,
	2015	55.650.000	41.580.000
	2016	62.000.000	54.250.000
	2017	65,100,000.	141,240,000
Kabupaten Musi Rawas	2013	25.000.000	25.020.000
	2014	25.000.000	25.560.000
	2015	25.000.000	33.380.000
	2016	35.000.000	39.760.000
	2017	35.000.000	40.968.800
Kabupaten Muara Enim	2013	52.500.000	32.008.000
	2014	52.500.000	42.358.200
	2015	45.000.000	46.778.000
	2016	45.000.000	53.150.000
	2017	50.000.000	62.708.800
Kabupaten Lahat	2013	100.000.000	20.690.000
	2014	50.000.000	17.900.000,
	2015	50.000.000	13.200.000
	2016	50.000.000	28.077.500
	2017	50.000.000	16.850.000
Kabupaten Ogan Komerling Ulu	2013	128.844.000	48.671.750
	2014	50.176.000	36.138.925
	2015	50.176.000	16.840.860
	2016	49.896.676	30.267.198
	2017	49.896.676	62.583.815

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten, 2019

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih adanya Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mencapai Target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak Sarang Burung Walet ikut berkontribusi dalam rangka mengefisiensikan pelaksanaan pembangunan Daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian mengenai Pajak Daerah pernah dilakukan oleh Hanipah (2015) tentang pengaruh efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian lain yang sama-sama berkaitan dengan pajak daerah yaitu mengenai Analisis dan Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Penerimaan Pajak Asli Daerah yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2017) menunjukkan bahwa hasil perhitungan dan analisis atas efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2015 dapat dikatakan cukup baik namun masih tergolong kurang efektif dengan jumlah rata-rata 79,77%, dan Kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2015 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis masih dalam kategori sangat kurang, dengan jumlah kontribusi rata-rata 0,141% pada penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manopo (2015) dalam penelitian berjudul Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas

Pajak SBW tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mardiana (2017) yang meneliti tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek serta tahun penelitian. Dalam penelitian Mardiana (2017) sebagai obyek penelitiannya adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan periode penelitiannya pada tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini sebagai subyeknya adalah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan periode penelitian tahun 2013-2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Manopo (2015) terletak pada obyek penelitian dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Manopo (2015) obyeknya pada Kabupaten Minahasa, dengan periode penelitian tahun 2013 dan 2014, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hanipa (2015) terletak pada subyeknya dimana peneliti tersebut mengangkat fenomena tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan objeknya pada Kota Bandung.

Dalam penelitian ini sebagai obyeknya adalah Pajak Sarang Burung Walet di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan dengan periode penelitian tahun 2013-2017, Alasan pemilihan obyek penelitian pada Pajak Sarang Burung Walet di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan dikarenakan melihat masih terdapat Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan yang Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet nya masih belum mencapai target Anggaran pendapatan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Pengaruh Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Efektifitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan Secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan Secara parsial ?
3. Bagaimana pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan Secara simultan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai 2017
2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai 2017
3. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai 2017

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Efektifitas Pajak Sarang Burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kontribusi Pajak Sarang Burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan secara Simulutan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi penulis
 Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Sarang Burung Walet Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan di sektor Pajak Sarang Burung Walet.
3. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya
 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
4. Bagi Pihak Lainnya
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Pada Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.